

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN  
OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**BAYU SAPUTRA**  
**NPM : 167310425**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan  
Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriterial metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Syaprianto, S.Sos. M.IP



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan  
Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Ketua

  
Syaprianto, S.Sos. M.IP

Sekretaris

  
Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Anggota

  
Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR 087 /UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Angg** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Dasar** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Perhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Ditentukan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Bayu Saputra  
N P M : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas sosial Kota Pekanbaru**

**Struktur Tim :**

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.IP.      | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.  | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si        | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Sebagai Notulen                      |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2022

Dekan,



**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK : 080102337

Disampaikan Kepada :

Wakil Rektor UIR  
Kep. Ka. Biro Keuangan UIR  
Ketua Prodi .....  
p -----sk.penguji-----

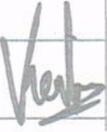
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0087 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak jaianan oleh Dinas Sosiai Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 80,1 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos.,M.IP	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggoia	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.SoS., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022

An. Dekan,

**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan Bid. Akademik



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan  
Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akasemisi, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Syaprianto, S.Sos. M.IP

Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan  
Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akasemisi, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

An. Tim Penguji

Ketua

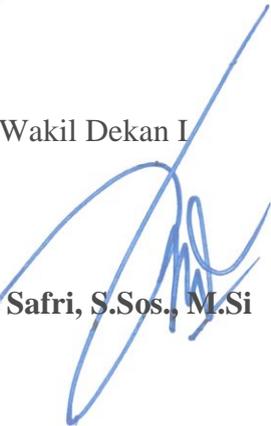
  
Syaprianto, S.Sos. M.IP

Sekretaris

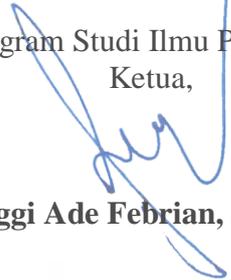
  
Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi,SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik BapakDr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dan menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, SIP.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Syaprianto.,S Sos.,M.I.Patas ketulusan hati dan dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Ayahanda Rudi Harto dan Ibunda tercinta Asma Yanti, beserta adek-adek yang saya sayangi Widya Ningsih, Putri Yani, M. Ilham Saputra, Om Andi, Om Alpi, Om Edi S., Acik Rita beserta seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do'a restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya bagi penulis.
7. Kepada Seluruh Teman-teman HMI MPO (Himpunan Mahasiswa Islam), KPB (Keluarga Peforma Bisa) yang telah mensupport saya dan tidak hentinya memotivasi bagi penulis.
8. Sahabat-Sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi penulis Kanda Zunnur Roin S.Sos, Bg Febri Romadhan, Bg Fahmi Reza p, Bg

Dian Aksara S.IP, Bg Andi, Kak Cessa S.IP, Kak Bella S.IP, Kak Azizah S.IP, Atika Chairin, Princess Anita Silvia S.IP, Arifa Adilla, Adina Saputri, Rudyansah, M.beny, Mas Bro, Ridho C, Efrian, Kurnia R, Shintia Y, Yola F, Shintia D, Diki A, Anak Rantau Dan teman seperjuangan IP E angkatan 2016 dan teman – teman yang telah banyak memberi support dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan Sukses dimasa depan, Aamiin Ya Robbal'aalamiin

Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 9 Maret 2022  
Penulis,

**BAYU SAPUTRA**

## DAFTAR ISI

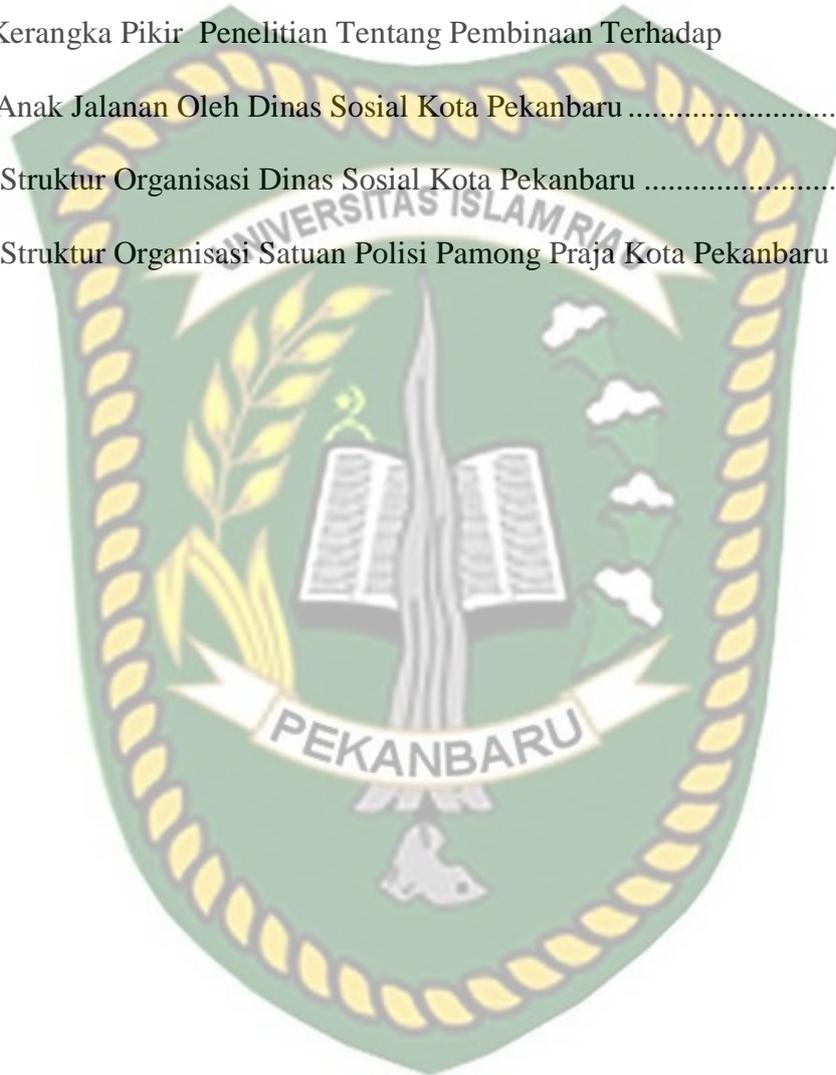
Halaman

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Pemerintahan.....	15
2. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	17
3. Konsep Kebijakan Publik.....	18
4. Konsep Evaluasi.....	24
5. Konsep Pembinaan.....	30
6. Konsep Anak Jalanan.....	38
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Pikiran.....	43
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasional Variabel.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	47

B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Key Informan dan Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penarikan Informan.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisa Data.....	50
H. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	52
B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	57
C. Gambaran Umum Satpol PP Kota Pekanbaru.....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan Dan Key Informan.....	67
B. Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	71
C. Hambatan-hambatan Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	82
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	43
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	62
IV.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jumlah Data Yang Terjaring Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	10
I.2. Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	11
II.1. Peneitian Terdahulu.....	42
II.2. Opeasional Variabel .....	46
III.1. Informan Penelitian .....	48
III.2. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitia.....	51
IV .I Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru .....	52
IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin DiKotaPekanbaru.....	54
IV.3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur DanJenisKelamin .....	55
IV.4. Jenis Pendidikan di Kota Pekanbaru.....	56
V.1 Identitas Informan Penelitian Penulis tentang Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial KotaPekanbaru.....	68
V.2 Identitas Informan dan Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	69
V.3 Identitas Informan dan Key Informan Berdasarkan Kriteria Umur .....	70
V.4 Identitas KeyInformen dan Informen Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Saputra  
NPM : 167310425  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Bayu Saputra

# EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

BAYU SAPUTRA

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Anak Jalanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati Evaluasi Progam Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Karena masih banyak anak jalanan yang masih berkeliaran di jalan. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang digunakan adalah metode tipe penelitian Kualitatif dengan cara *Survey*, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk mengamati kondisi lokasi penelitian. Terdapat key informan dan informan pada penelitian ini yaitu Kepala Seksi Rehabilitas Sosial dan Pelindungan Anak, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang anak jalanan. Tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam menetapkan key informan dan informan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data skunder yang di kumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan dan catatan serta dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Evaluasi dari William dunn yang terdapat 6 indikator yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsive, dan ketepatan. Berdasarkan teknik mengamati ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Evaluasi Progam Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada pada penilaian cukup maksimal. Karena beberapa program pembinaan oleh dinas Sosial sudah berjalan dengan maksimal.

# EVALUATION OF THE DEVELOPMENT PROGRAM FOR STREET CHILDREN BY THE SOCIAL OFFICE OF THE CITY OF PEKANBARU

## ABSTRACT

BAYU SAPUTRA

Keywords: Evaluation, Coaching, Street Children

This study aims to observe the Evaluation of the Guidance Program for Street Children by the Pekanbaru City Social Service. Because there are still many street children who still roam the streets. The type of research located at the Pekanbaru City Social Service used is a qualitative research method by means of a survey, namely prioritizing the interview list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to observe the condition of the research location. There are key informants and informants in this study, namely the Head of the Section for Social Rehabilitation and Child Protection, the Head of the Operations and Public Order Division of the Civil Service Police Unit, 3 street children. Three data collection techniques used in determining key informants and informants are interview, observation and documentation techniques. The types and techniques of data collection used consisted of primary data which was collected through a list of interviews and field research results as well as secondary data collected using reports and notes and documents. The theory used in this study is William Dunn's Evaluation theory which contains 6 indicators, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Based on this observation technique, the researchers assessed and concluded that the Evaluation of the Development Program for Street Children by the Pekanbaru City Social Service was in a fairly maximal assessment. Because several coaching programs by the Social Service have been going well.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, yang tercatat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam alenia ketiga, “Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan negara tentang kesejahteraan umum dan kesejahteraan rakyat hingga adil ke daerah salah satu cara yaitu dengan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan hak otonom, yang diatur pada pasal 18 Undang – Undang Dasar ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang – Undang Pemerintahan Daerah mewakili wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menjalakan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas – tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hirarki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan merubah keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan – urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka menjamin terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Berdasarkan pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian didalam pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, didalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sebagai satuan Pemerintahan Daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga didaerah

ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 12 Undang – Undang 23 Tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintah yang diwajibkan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Dari sejumlah urusan – urusan yang wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terkhusus pada perlindungan anak yang masih dengan saat ini menjadi permasalahan diberbagai wilayah yang ada di Indonesia. Salah satu permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak, ialah masih adanya anak jalanan.

Kesejahteraan dan keadilan harus didapatkan seluruh warga Indonesia, baik jasmani, rohani dan ekonomi, namun masih saja kita lihat cita – cita dari Bangsa Indonesia ini masih terhalang dengan beberapa kendala kesejahteraan sosial, salah satu fokusnya adalah anak jalanan yang masih kurang dalam pembinaan dan penanganan pemerintah.

Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebut anak terlantar adalah tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang – Undang Dasar

1945 “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Undang – Undang tersebut juga merupakan peningkatan atas status stratifikasi konvensional – hak anak yang sebelumnya hanya berupa Kepres Nomor 36/1990. Undang – Undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu mata kehidupan dan penghidupan anak yang mendapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara mental, jasmani, rohani, maupun sosial.

Pengertian anak jalanan menurut Departemen Sosial (2005) Republik Indonesia adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari – hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran jalan dan tempat – tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri – ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak – anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalanan atau tempat – tempat umum lainnya, baik untuk mencari nafkah ataupun berkeliaran. Dengan ciri – ciri berpakaian tidak terurus, kusam, dan mobilitasnya tinggi.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dan merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru tengah mengalami perkembangan yang signifikan dimana kota ini merupakan sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Dengan perkembangan kota yang sangat padat sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti kurangnya kesempatan kerja bagi

masyarakat yang minim pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sehingga memicu adanya beberapa masyarakat yang mencoba mencari penghasilan dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya seperti salah satunya mencari nafkah di jalanan, seperti menjual tisu, koran, jasa pembersih kendaraan dengan kemoceng, dan mengamen yang melibatkan anak – anak dibawah umur, yang menjadi anak – anak tersebut sebagai anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak yang bertempat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan berupa rehabilitasi, dengan program reunifikasi (pemulangan anak kepada keluarga) dan pelatihan kerja seperti keahlian mesin (bengkel), pangkas rambus, tata rias, dan merangkai bunga.

Untuk mengurus urusan mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru membantu Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan perlindungan anak.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
  3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari sekian banyak struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru salah satunya adalah Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, kemudian di dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

dijelaskan bahwa Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
- d. Perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/ belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- e. Perumusan dan penyiapan bahan – bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).
- f. Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
- g. Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/ anak melalui pengangkatan anak (adopsi).

- h. Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
- i. Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak.
- j. Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
- k. Perumusan dan peningkatan usaha – usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- m. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang di ambil dalam pemecahan masalah.
- n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Menurut data jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Data Anak Jalanan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Terjaring	Anak Jalan
1	2018	43	28
2	2019	111	49
3	2020	153	85
<i>Jumlah</i>		285	195

*Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru*

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengamati sebagian wilayah Kota Pekanbaru menemukan masih banyak anak jalanan yang melakukan aktivitas seperti, menjual tisu, koran, membersihkan kendaraan dengan kemoceng di lampu merah, dan mengamen di jalanan Kota Pekanbaru terutama pada berbagai persimpangan lampu merah Kota Pekanbaru.

Sebagaimana anak – anak lain, anak jalanan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan masa berkembang baik perkembangan fisik maupun mentalnya, seperti mendapatkan hak pendidikan, pelayanan kesehatan, bermain dan sebagainya.

**Tabel 1.2 Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Bentuk Pembinaan
1	2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/ keluarga)</li> <li>2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan, tempat tinggal, dan makanan)</li> <li>3. Refral (dirujuk ke panti sosial)</li> </ol>
2	2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/ keluarga)</li> <li>2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan, tempat tinggal, dan makanan)</li> <li>3. Refral (dirujuk ke panti sosial)</li> </ol>
3	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunifikasi (dipertemukan dengan orang tua/ keluarga)</li> <li>2. Mendapatkan jaminan sosial (kesehatan, tempat tinggal, dan makanan)</li> <li>3. Refral (dirujuk ke panti sosial)</li> <li>4. Pelatihan kerja (keahlian mesin, pangkas rambut, tata rias, merangkai bunga)</li> </ol>

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018-2019 semua program dapat terlaksanakan. Sedangkan pada tahun 2020 program yang teraksana hanya program reunifikasi. Hal ini terjadi karna dampak dari Covid 19 sehingga beberapa program tidak dapat terlaksana.

Berdasarkan Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru peneliti menemukan adanya beberapa program yang tidak terlaksana sehingga perlu dilakukannya Evaluasi terkait dengan Program Pembinaan Anak Jalanan tersebut. Hal ini mengindikasikan permasalahan anak jalanan ini tidak henti hentinya disoroti sebagai permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sehingga peneliti beranggapan apakah program pembinaan yang selama ini di terapkan tidak sesuai atau tidak berjalan dengan baik. Faktor inilah yang membuat peneliti tertarik dan ingin mengevaluasi program pembinaan anak jalanan teersebut.

Dari sekian banyak tugas yang dijalankan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan – bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disablitas), kemudian perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti, dan perumusan pengendalian, pengawsan dan pembinaan terhadap semua upaya di bidang tugasnya. Hal tersebut karena masih maraknya

anak jalanan di Kota Pekanbaru yang menyebabkan permasalahan sosial serta ketimpangan sosial yang mestinya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Akan tetapi pelaksanaan fungsi tersebut belum terlaksana dengan maksimal, beberapa fenomena ditemui dilapangan yaitu:

1. Anak jalanan yang sudah menjalankan program pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap saja kembali hidup kejalanan karena adanya dorongan dari faktor ekonomi
2. Adapun program anak jalanan yang belum terlaksana yaitu mendapatkan jaminan social dan pelatihan kerja maka pihak dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru perlu di evaluasi

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebgiberikut :

1. Bagaimana Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan evaluasi program pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui pelaksanaan Evaluasi Proram Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan program Pembinaan Anak Jalanan.

### 2. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam menambah khasana keputakaan sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menghadapi masalah Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak – pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan nasional, perbedayaan dan peranan pemerintah sangat penting oleh karen itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yan telah diatur peraturan perundang – undangan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan – badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekuti, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan – badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F Strong, 2014;10).

Menurut Boediningsing (2010;1) pemerintahan dalam arti luas menurut ajaran Montesque dalam trias politica meliputi tiga kekuasaan 1) pembentukan undang – undang, 2) pelaksanaan; dan 3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah hanya dalam pelaksanaan (eksekutif) saja, tidak termasuk dalam badan perundang – undangan, peradilan dan kepolisian.

Sedangkan Erliana Hasan (2010;2) menyatakan bahwa pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan suatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberi tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamana negara.

Inu Kencana Syafi'i (2013; 3) menyatakan bahwa didalam kata dasar “pemerintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
3. Hal yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbak balik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Max Iver (dalam Labolo, 20013; 28) pemerintahan sebagai sebuah organisasi dari kelompok orang yang memiliki kekuasaan dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah.

Menurut Ndaraha (2003;6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Labolo, 2013;38) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintahan adalah membuat kebijakan publik. Maka dari itu pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan dan

tanggungjawab penuh dalam mewujudkan cita – cita negara untuk melayani kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan sipil.

Sedangkan menurut Musanef (2002;15) pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksana tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Maka dari itu, setiap masyarakat dari Sabang sampai Merauke atau siapa saja yang secara legal tinggal di wilayah Indonesia pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerintah mampu melayani masyarakat secara adil tanpa ada kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan didalam negaranya sendiri.

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Brasz (dalam Syafi'e, 2013; 20) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Selanjutnya Ilmu Pemerintahan menurut Poeljie (dalam Syafi'e, 2013; 21) Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas disusun dan dipimpin dengan sebaik – baiknya.

Menurut Ndraha (2011; 7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kemudian menurut Wasistiono (2015; 61) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertunggi suatu negara yakni pemerintah berhubungan dengan masyarakatnya dalam kaitan hak dan kewajiban kepada negara. Sebaiknya warga negara mempunyai hak dan kewajiban kepada negara.

Menurut Soewargono (dalam Ndraha, 2010; 16) berpendapat bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara otomatis mempelajari bekerjanya struktur – struktur dan proses – proses pemerintahan umumn, baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya menurut U. Rosental (1978; 17) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

Sehingga melihat dari defenisi diatas bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada negara.

### 3. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris ialah *policy* kata *wisdom* yang berarti kebijakan dan kearifan. Dunn (2003; 123) kebijakan public (*public*

*policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan – pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan – keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2006; 6) sebagai keputusan tetap yang tetap dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mematuhi keputusan tersebut. Dan menurut Dye (dalam Agustino 2008; 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut (Abdul Latif, 2005; 88) kata kebijakan yang berarti perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu. Selanjutnya untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Menurut (Nugroho, 2004; 186) menyatakan bahwa kebijakan mempunyai beberapa kriteria umum yaitu: efektifitas, kecukupan, dan kelayakan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan – keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan secara umum menurut (Said Zainal Abidin, 2004; 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang – undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan.
4. pelaksanaan.

Menurut Ndraha (2003; 498) kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai – nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

Kebijakan menurut James E. Anderson, (dalam Islamy, 2001; 13) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan – tindakan atau kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut (Edi Suharno, 2008; 11) istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata policy. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan maupun kebijakan. Demikian Budi Winarno dan Solichin A.Wahab sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan program, keputusan, undang – undang, ketentuan – ketentuan, standar, proposal dan Grand design.

Menurut (Kencana, 2005; 145) kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan perhatian utamanya adalah public polici, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Menurut (Nugroho R., 2004; 1-7) kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai

dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Sementara itu pakar kebijakan publik (Thomas Dye, 1992; 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Aminullah dalam Muhammadi, 2001; 371-372) Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Menurut (Sulaeman, 1998; 24) kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Menurut (Santoso, 1988; 5) kebijakan publik itu ialah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu

dan juga petunjuk – petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan – peraturan atau dekrit – dekrit pemerintah.

Menurut (Suradinata, 1993; 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005; 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan penting yaitu sebagai berikut:

- a) Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
- b) Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan – pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c) Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d) Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.

- e) Evaluasi kebijakan, yakni proses monitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

#### 4. Konsep Evaluasi

Konsep evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing – masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata – kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah – masalah kebijakan dibuat jelas (William N Dunn, 2000:21).

Anderson (dalam Arikunto Suharsimi, 2000:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapainya beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (dalam Arikunto Suharsimi, 2000:1), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencapaian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Fungsi evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi

memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai juga kritik menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternative sumber nilai ( misalnya kepentingan kelompok) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalisme ( misalnya teknis, ekonomis, legal, social, substantive)

Evaluasi memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari metode – metode kebijakan lainnya :

1. Focus nilai
2. Interdedependensi fakta – nilai
3. Orientasi masa kini dan masa kampau
4. Kualitas nilai

Fungsi evaluasi menurut willian N. Dunn adalah :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendevenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju

3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan targer perlu didefinisi ulang
4. Evaluasi juga dapat menunjang alternative kebijakan yang baru atau revuisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan diunggunlkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan lainnya.

Sedangkan menurut Weiss (2002:39), ada empat manfaat melakukan evaluasi dengan kebijakan : pertama, umpan baluk untuk memperbaiki program yang sedang berlangsung. Kedua, masukan pada akhir program. Ketiga, masukkan tingkat kebijakan yang lebih tinggi guna memutuskan apa yang harus dikerjakan tergadap seluruh program. Keempat, sejata bagi kelompok tertentu untuk mempengaruhi kebijakan.

Menurut Dunn (2003:607), evaluasi kebijakan mempunyai empat fungsi, yaitu: pertama, eksplanasi yaitu melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat diperbuat duatu generalisasi tentang pola pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Kedua, kepatuhan yaitu, melalui evaluasi dapat siketahui apakah tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku lain, sesuai dengan standart prosedur

yang ditetapkan kebijakan . ketiga, auditing yaitu, melalui evaluasi dapat diketahui apakah out put benar benar sampai ketangan kelompok sasaran maupun kelompok penerima lain (individu, keluarga, organisasi, birokrasi desa masyarakat dan lain lain) yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. Keempat, akunting yaitum dengan evaluasi dapat diketahuo apa akibat social ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dalam melaksanakan evaluasi paling tidak harus melalui empat langkah utama yaitu : menetapkan standart dan metode untuk pengukuran melakukan pengukuran terhadap apa yang telah dilakukan mencocokkan antara pevormance dan standart pelayanan tindakan kolektif.

Pendapat willian N dunn (2003:608) istilah evaluasi mempunyai arti yaitu, “secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*apparaisali*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisi hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifil, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai nilai manfaar hasil kebijakam” pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil dari usaha atau tujuan sasara kebijakan. Bagian akhri dari proses kerja adalah evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakann niali yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu

kebijakan bermandaar bagi pelayanan public. Adapun menurut taliziduhu ndraha dalam buku konse0 administrasi dan administrasi di Indonesia terdapat bahwa evaluasi kmerupakan perbandingan antara standar dengan faktga dan analisa hasilnya (ndraha, 1999) kesimpulannya adalag perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Sudirman denim mengemukakan defenisi penilaian evaluating adalah “proses pengukuran dan perbandingan dan hasil hasil pekerjaan yang nyatanya dicapay dengan hasil seharusnya” ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam defenisi tersebut , yaitu (denim,2004)

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organic karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnnya suatu orgainsasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang harus terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai

Dari pendapat diatas dapat dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan didalamnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama, yaitu focus nilai, karena evaluasi adalah penilain dari kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interpendensi fakta nilai, karena untuk menentukan nilai dari suat suatu kebijan bukan dilihat dari tinglat krnirja tetapi juga dilihat dari suatu kebijakan bukan berarti kenieja dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga, yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntunan evaluative diarahkan pada hasil seorang dan masa lalum sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai kebijakan tersebut. Keempat, yaitu dualitas nilai, karena dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengn nilai yang ada maupun dengan nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan lain. Sedangkan kriteria/indicator evaluasi menurut dunn (2003:601) sebagai berikut :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Pemerataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu
6. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai. (sumber: Kutipan internet [lanmakassae.info/pemerinrah daerah](http://lanmakassae.info/pemerinrah daerah))

### **5. Konsep Pembinaan**

Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996; 134) adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan menurut Widjaya (dalam Bukharis, 2012) adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan – urutan pengertian, diawali mendirikan kebutuhan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha – usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Hidayat, S. (dalam Alfatawy, 2012) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan – tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Menurut Depdiknas (2008; 193) pembinaan berasal dari kata dasar “bina” yang berarti membangun, mendirikan sesuatu supaya lebih baik. Pembinaan yaitu proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Wibowo (2007:165) sumber daya manusia dalam setiap organisasi, meskipun telah melalui tahap seleksi yang baik namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat di selesaikannya sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia.

Musanef (2000:47) menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubung langsung dengan perencanaan, penusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala – segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Mulyasa (2007; 173) pembinaan dilakukan untuk kearah yang lebih baik lagi agar terjadi suatu peningkatan dalam bekerja. Pembinaan diharapkan dapat membantu seseorang memecahkan masalah dan kesulitan yang mungkin akan dihadapi di dalam menggunakan cara – cara baru untuk melaksanakan tugasnya agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Akmal Hawi (2013; 85) mengatakan kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata *training* yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan.

Pembinaan menekankan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang – orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu , proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Mathis (2002:307-08) juga mengemukakan empat tingkat pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis antara lain :

1. Mengatur strategi yaitu manajer – manajer SDM dan pembinaan harus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi.
2. Merencanakan yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembinaan yang akan membawa hasil – hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat dikukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan dan mengembangkan investasi – investasi pembinaan.
4. Memberi pembedaan yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut.

Kesalahan – kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan di masa depan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan dapat di tinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan sudut pengawasan. Pembinaan yang berasal dari sudut pembaharuan yaitu merubah sesuatu menjadi baru dan memiliki nilai – nilai yang lebih baik bagi kehidupan di masa depan. Sedangkan pembinaan dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang lebih direncanakan.

Adapun Tujuan Pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional.
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman – teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Menurut Ivancevich (2008; 46) mendefinisikan bahwa sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan.

Tujuan pembinaan ialah untuk mengembangkan keahlian, pengetahuan dan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerja sama antara pedagang dan pemerintah.

Menurut Santoso (2005; 52) mengatakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso (2005; 57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan kemampuan-kemampuan agar dapat membentuk sikap dan berperilaku yang seharusnya.

b. Pengarahan

Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Pengarah adalah suatu proses dimana pimpinan memberi intruksi, petunjuk, dan mengawasi pelaksanaan pekerja untuk mencapai tujuan.

c. Bimbingan

Bimbingan adalah salah satu bentuk helping (bantuan) yang di berikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam melakukan bimbingan harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Simanjuntak (1990; 84) Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakuka secara sadar, berencana, terarah teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbingn dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan – kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Menurut Mangunhardjana (1986; 17) untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seseorang pembina, antara lain:

- a. Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik, Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.

- b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c. Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat didalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung erlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.

Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada disekolahan dan lingkungan sekitar.

Pentingnya Pembinaan menurut Damiri (2013; 4) Pertama adalah fungsi dalam suatu pembinaan sangat berpengaruh besar terhadap hasil dari suatu pengembangan yang menekan pada proses latihan dan hasil pencapaian dari pembinaan tersebut. Walaupun dari segi bakat anak, hanya sebatas bakat biasa namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika pembinaan yang dilakukan maksimal maka hasil yang di dapat adalah bukan sekedar bakat atau hobby melainkan sebuah prestasi. Kemudian hal yang bisa diambil bahwa proses pembinaan yang sudah terstruktur dengan baik akan berdampak baik pula pada

perkembangan siswa tersebut, ini dilakukan karena penerapan manajemen yang didukung penuh oleh pembina dan siswa. Semuanya dikarenakan adanya pengatur program yang dilakukan dengan cukup baik dalam penerapan tahap jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Menurut pendapat Santoso S. (dalam Della Puspita, 2016) yang menungkapkan beberapa cara dilakukan dalam pembinaan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

b. Pemberian Bimbingan

Pemberian Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mengajak, mengiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

c. Memberikan Pengarahan

Pengarahan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

d. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode. Jadi pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

**6. Konsep Anak Jalanan**

Anak adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut (Koesparmono, 2009; 63).

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan bangsa dan Negara pada masa depan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, mengatakan bahwa anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah dijalan atau ditempat umum.

Pada peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak. Pasal 11 tentang hak dasar anak yaitu:

1. Setiap anak dapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Sebelum anak mendapatkan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga, orang tua, wali. Lembaga pendidikan,

lembaga sosial dan lembaga terkaitlainnya menjaminakan perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

3. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (30) meliputi pembinaan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
4. Pemerintah daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan formal, non formal, dazn informal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha.
5. Setiap anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diaznutnya dengan diajarkan oleh pendidikan yang menganut agama yang sama.
6. Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di semua jenjang baik formal, non formal maupun informasi, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintahan terkait.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiata ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya (Suyanto, 2010). Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

Dari berbagai data penelitian diperoleh oleh penelitian bahwa anak jalanan bekerja dijalan adalah karena untuk memenuhi kebutuhan

merekasendiri ataupun untukmembantu menambah penghasilan ekonomi keluarga. Tak jarang juga merekaada yang secara sengaja disuruh oleh kedua orang tua mereka untuk bekerja, malah untuk urusan sekolah dilarang. Dalam mind set kedua orang tua anak jalanan tersebut hanyalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi saja sedangkan urusan lainnya tidak terlalu dipikirkan.

Baginya anak haruslah berkewajiban untuk membantu kedua orang tua mereka dan salah satu caranya adalah dengan cara bekerja. Sehingga mereka sengaja mendidik anak-anaknya dengan cara yang keras yaitu dengan memperkerjakannya sebagai anak jalanan dan menghadapannya dengan bagaimana kerasnya hidupan. Padahal, pada kisaran umur mereka yang masih dini tentunya belum mampu untuk memikirkan berbagai beban kehidupan sehingga dapat disimpulkan bahwa anka-anak jalan secara tidak sengaja sudah menjadi dewasa secara instan karena pada hakekatnya mereka sudah dihadapkan dengan berbagai perjuangan kehidupan. Kesalahan pemikiran kedua orang tua anak jalanan tersebut mungkin dikarenakan berbagai hal diantaranya adalah pendidikan yang meminim dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka (Arief, Armai 2004).

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalan atau tempat – tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan dijalan atau tempat – tempat umum seperti perdaganganasongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain – lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu

ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu (Zulfadi, 2004).

Dari definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak – anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak – anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu dan lain – lain) oleh orang – orang disekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri – ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 21 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 1: Penelitian Terdahulu Terkait Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Amadhani (57310426)	Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Pekanbaru (2019).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Teori penelitian</li> <li>- Sama – sama meneliti anak jalanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek penelitiannya lebih banyak</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>
2	Jonathan Tribuwono	Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial, 2017).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama – sama meneliti anak jalanan</li> <li>- Sama – sama meneliti di Dinas Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Teori penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> <li>- Objek penelitiannya lebih banyak</li> </ul>
3	Yamsul Arifin	Pembinaan Anak Jalan Oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2017).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama – sama meneliti anak jalanan</li> <li>- Teori penelitian</li> <li>- Sama – sama meneliti di Dinas Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>
4	urniyadi	Pembinaan Anak Jalanan Melalui Lembaga Sosial (2014).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama – sama meneliti anak jalanan</li> <li>- Teori penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian</li> <li>- Tahun Penelitian</li> <li>- Instansi yang diteliti</li> </ul>
5	urnia Putra Jasti <i>Journal</i>	Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Pekanbaru (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama – sama meneliti anak jalanan</li> <li>- Lokasi penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori penelitian</li> <li>- Tahun penelitian</li> </ul>

Sumber: Olahan peneliti tahun 2021

### C. Kerangka Pikir

**GambaranII.1: Kerangka Pikir Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**



*Sumber: Olahan peneliti tahun 2021*

#### D. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman tentang konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan yang kemudian diuji melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah proses kegiatan mulai dari peengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penilaian dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi, pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai mentaati peraturan yang berlaku.
3. Penyuluhan adalah merupakan suatu kegiatan mendidik suatu kepada masyarakat, memberi pengetahuan, informasi – informasi dan kemampuan – kemampuan agar dapat memebentuk sikap dan berprilaku yang seharusnya.
4. Pengarahan adalah merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bahwa agar bersedia mengerti menyumbangkan ternaganya secara efektif serta efesien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

5. Bimbingan adalah salah satu bentuk helping (bantuan) yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan.
6. Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya dijalanan dengan melakukan kegiatan – kegiatan untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya.
7. Dinas Sosial adalah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya



### E. Operasional ariabel

**Tabel II. 3: Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
valuasi adalah	valuasi	1. Efektifitas	1. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
enilai dari	Program		2. Hasil yang diharapkan terwujud
bijak dalam	Pembinaan		3. Hasil yang memuaskan
ketepatan	Terhadap		
capaian	Anak	2. Efisiensi	1. Adanya tindakan merealisasikan tujuan
dan sasaran	Jalanan		2. Ketersediaan biaya/dana
bijakan.	Oleh		
	Dinas	3. Kecukupan	efektivitas dari pelaksanaan Program memuaskan
	Sosial		
	Kota	4. Pemerataan	1. survey yang dilakukan secara merata
	Pekanbaru.		2. kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur
		5. Responsivitas	1. Adanya respon terhadap hasil kerja
			2. ada upaya untuk mencapai tujuan
		6. Ketepatan	1. adanya program strategi baru
			2. adanya manfaat dalam pengembangan program
			3. program sesuai dengan tujuan

Sumber: Olahan peneliti tahun 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain – lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu – ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata – kata (lisan atau tulisan).

Menurut Nanang Martono (2016;11) penelitian kualitatif adalah data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen – dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan memfokuskan kepada 3 tempat dimana terdapatnya anak jalanan. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan masalah-masalah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada anak jalanan.

Hal ini didasari pada masih banyak terdapat anak jalannya yang beraktivitas di simpang lampu merah diberbagai tempat di Kota Pekanbaru. Mengingat Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau dan juga merupakan pusat pemerintahan Provinsi Riau tentunya dengan masih adanya anak

jalan-an hal ini menggambarkan masih adanya kesenjangan sosial dan/ atau permasalahan sosial. Pembinaan terhadap anak jalan-an merupakan tanggungjawab dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016.

### C. Key Informan dan Informan

Menurut Moleong (2006; 132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu Andi (2010; 147) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Key Informan adalah informan yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Key informan adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

**Tabel III.1 Informan Penelitian Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalan-an Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Fajrina, S.IP	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	Key Informan
2	Rezatul Helmi, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Informan
3	3 orang anak jalan-an	Anak Jalan-an	Informan
<i>Jumlah</i>		5	5

*Sumber: Olahan peneliti 2021*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu mengambil populasi subjek yaitu pejabat struktural Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang yaitu, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak. Dan terdapat juga Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai Mitra dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dan juga menggunakan accidental sampling yaitu mengambil populasi subjek dengan mengumpulkan sampel melalui anak jalanan yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah 3 orang. Sampel tersebut di ambil secara acak.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data – data utama yang paling penting dari pihak – pihak terkait di jadikan sebagai referensi setelah di olah. Adapun dalam penelitian ini data yang di butuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi Mengenai Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, terutama guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang penulis peroleh dan kemudian mendukung tujuan penelitian ini, baik melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, maupun data yang diperoleh dari Dinas Sosial.

## F. Teknik Pengumpulan Data

- 1.) Observasi, dengan observasi peneliti secara langsung akan mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala atau fenomena pada penelitian.
- 2.) Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara oleh pengumpul data terhadap responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (Irwan Soehartono 1998;67).
- 3.) Studi kepustakaan/ literatur, studi literatur digunakan untuk mendukung permasalahan penelitian, dari buku dan sumber lainnya.
- 4.) Studi dokumentasi, dilakukan untuk melengkapi data dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti dengan jalan mencari informasi dari dokumen yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini.
- 5.) Bahan dan alat peneliti, adalah perlengkapan media yang digunakan selama penelitian. Adapun bahan dan alat penelitian yang diperlukan, antara lain: handphone untuk mengambil foto atau gambar mengenai objek yang diteliti dan form isian penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau

penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2009;11).

Menurut Patton (dalam Moleong 2005;208) analisa data adalah proses mengatur urtan data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ini dapat dibedakan dengan penafsiran yaitu membedakan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi – dimensi uraian.

#### H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun rencana jadwal waktu kegiatan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Kemmingu 2021															
		Juni				Agustus				Sep – Nov				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	x	x	x												
2	Seminar UP						x	x									
3	Revisi UP							x	x								
4	Penelitian Lapangan								x	x	x						
5	Pengelolaan dan analisis data										x	x					
6	Bimbingan skripsi											x	x				
7	Ujian Skripsi													x	x		
8	Revisi Skripsi														x		
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi															x	

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  sampai dengan  $101^{\circ} 34'$  bujur timur dan  $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$  lintang utara, dengan Ketinggian permukaan laut berkisar antara 5-11 m dari permukaan laut. Kota Pekanbaru menempati letak yang strategis ditengah-tengah pulau sumatera dan merupakan dataran yang sangat mudah dikembangkan. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1987 tanggal 7 september 1987 daerah kota pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ . Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan berdasarkan Perda kota Pekanbaru NO. 3 tahun 2003 maka luas kota pekanbaru dikembangkan dari 2,96 km dengan kecamatan berubah menjadi 446,50  $\text{km}^2$  dengan 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

Adapun luas dari kota Pekanbaru :

**Tabel IV .I Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2021**

No.	Kecamatan	Luas ( $\text{km}^2$ )	Kepadatan penduduk
	1	2	3
1.	Tampan	59,81	188.806
2.	Payung sekaki	43,24	93.790
3.	Bukit Raya	22,05	101.480
4.	Marpoyan damai	29,74	130.490
5.	Tenayan Raya	171,27	136.716

	1	2	3
6.	Lima puluh	4,04	41.994
7.	Sail	3,26	21.809
8.	Pekanbaru Kota	2, 26	25.784
9.	Sukajadi	3,76	47.814
10.	Senapelan	6,65	37.024
11.	Rumbai	128,85	70.219
12.	Rumbai Pesisir	157,33	69.016
	JUMLAH	632,26	964.942

*Sumber : Pekanbaru dalam angka tahun 2021*

Dari table tersebut, terlihat bahwa kecamatan tampan yang mendominasi jumlah penduduk terbesar yaitu 188.806, sedangkan kecamatan sail merupakan kecamatan yang penduduknya terendah yaitu 21.809. Kemudian jika dilihat letak kota pekanbaru yang secara geografis terletak antara :

1. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Siak.
2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Minas.

Secara administrasi kota pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C-33,8°C dan suhu udara minimum 23,0°-24,2°C sebagaimana daerah lainya yang beriklim tropis dikota pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Masalah penduduk dikota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia jumlah penduduk kota pekanbaru setiap tahun terus meningkat. Dibawah ini akan dipaparkan banyaknya penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin dikota pekanbaru dijelaskan pada table berikut ini :

**Tabel IV.2. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin dikota pekanbaru tahun 2021**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1.	Kecamatan Tampan	96.570	93.836
2.	Kecamatan Bukit Raya	51.983	51.165
3.	Kecamatan Sukajadi	26.591	23.423
4.	Kecamatan Senapelan	20.436	18.578
5.	Kecamatan Tenayan Raya	70.002	67.914
6.	Kecamatan Marpoyan Damai	66.236	65.343
7.	Kecamatan Rumbai	35.669	36.550
8.	Kecamatan Lima puluh	22.725	20.659
9.	Kecamatan Pekanbaru Kota	14.089	13.507
10.	Kecamatan Sail	12.115	11.421
11.	Kecamatan Rumbai pesisir	35.643	34.983
12.	Kecamatan paying sekaki	48.409	46.697
<b>Jumlah</b>		<b>500.468</b>	<b>484.076</b>

Sumber : Pekanbaru dalam angka, tahun 2021

Berdasarkan tabel IV.2. diatas maka yang mendominasi jumlah penduduk yang jenis kelamin adalah laki-laki. Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk kota pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

**Table IV.3 jumlah penduduk kota pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2021**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-04	54.419	52.956	107.375
2.	05-09	46.581	45.277	91.858
3.	10-14	41.248	40.306	81.554
4.	15-19	45.504	45.293	90.797
5.	20-24	59.141	58.099	117.240
6.	25-29	48.665	48.744	97.409
7.	30-34	42.795	42.795	85.687
8.	35-39	40.309	37.851	78.160
9.	40-44	33.346	30.451	63.797
10.	45-49	26.769	24.293	51.062
11.	50-54	19.621	17.272	37.348
12.	55-59	13.643	12.013	25.656
13.	60-64	7.875	7.209	15.084
14.	65-69	4.947	4.966	9.913
15.	70-74	3.071	3.310	6.381
16.	75+	2.308	2.929	5.237
<b>Jumlah</b>		490.339	424.219	964.558

Sumber : Pekanbaru dalam angka, tahun 2021

Dari table IV.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat usia penduduk Kota Pekanbaru didominasi pada usia 20-24 tahun yaitu 117.240, sedangkan usia yang paling sedikit adalah usia 75+ tahun keatas yaitu 5.237. sehingga dapat dilihat produktifitas penduduk masih dinilai tinggi.

## 1. Penduduk Menurut Agama

Untuk melaksanakan kewajiban dan pengabdian kepada sang pencipta maka masyarakat Pekanbaru tentu memerlukan sarana tempat ibadah sebagai tempat untuk ibadah kepada sang pencipta. Data yang dikumpulkan kementerian agama di kota Pekanbaru terdapat 586 mesjid dan 87 gereja yang dapat digunakan sebagai tempat beribadah oleh masyarakat Pekanbaru.

## 2. Sarana pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP, SLTA baik yang dikelola swasta.

Banyaknya sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan depdikbud tidak banyak mengalami perubahan kecuali data perguruan tinggi swasta ada perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menyusul rasio guru terhadap siswa, dosen terhadap mahasiswa.

Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung dari kualitas pendidikan, guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, maka diperlukan sarana pendidikan dan penyediaan guru yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.4. jenis pendidikan dikota pekanbaru tahun 2021**

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Swasta	Negeri
1.	STK	134	6
2.	SD	87	633
3.	SMP	70	97
4.	SMK	18	13

5.	SMA	11	21
6.	AKADEMIK	11	27
7.	PERGURUAN TINGGI	4	2
8.	KURSUS-KURSUS	38	3
9.	IBTIDAIYAH	38	101
10.	TSANAWIYAH	238	21
11.	ALIYA	39	2
	JUMLAH	688	926

Sumber : Pekanbaru dalam angka, tahun 2021

Selain dilengkapinya sarana dan prasarana serta fasilitas ruang belajar dalam menunjang kualitas pendidikan, kota pekanbaru telah memulai berbenah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini justru dapat dilihat dari perkembangan sarana pendidikan setelah adanya otonomi daerah. Sehingga kota pekanbaru diberikan kewenangan untuk mengelola tingkat kebutuhan pendidikannya.

## **B. Gambaran umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

Dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertikal yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu Belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan antara Belanda dengan Tenaga Nasional Indonesia, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekecauan disana-sini.

Untuk membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari pusat sampai kedaerah. Pada tahun 1950 inspeksi sosial

ditukar dengan jawatan sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 Pasal 34, yakni fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Pada tahun 1974 jawatan sosial diganti dengan Departemen sosial R.I untuk ditingkat pusat dan ditingkat provinsi disebut kantor wilayah departemen sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan departemen sosial kabupaten/kota.

Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh presiden RI yaitu, Abdurahman Wahid atau Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat Departemen Sosial RI diganti nama menjadi badan kesejahteraan sosial nasional (BKSNN). Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan kesehatan RI karna digabungkan dengan Departemen kesehatan.

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk kota Pekanbaru sesuai dengan struktur organisasi dan tata keaja dinas maka terbentuklah dinas sosial dan pemukiman kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan pemerintahan kota Pekanbaru.

## **2. Visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

### **a. Visi**

Visi Dinas Sosial kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat”.

**b. Misi**

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib, dan indah.

**3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

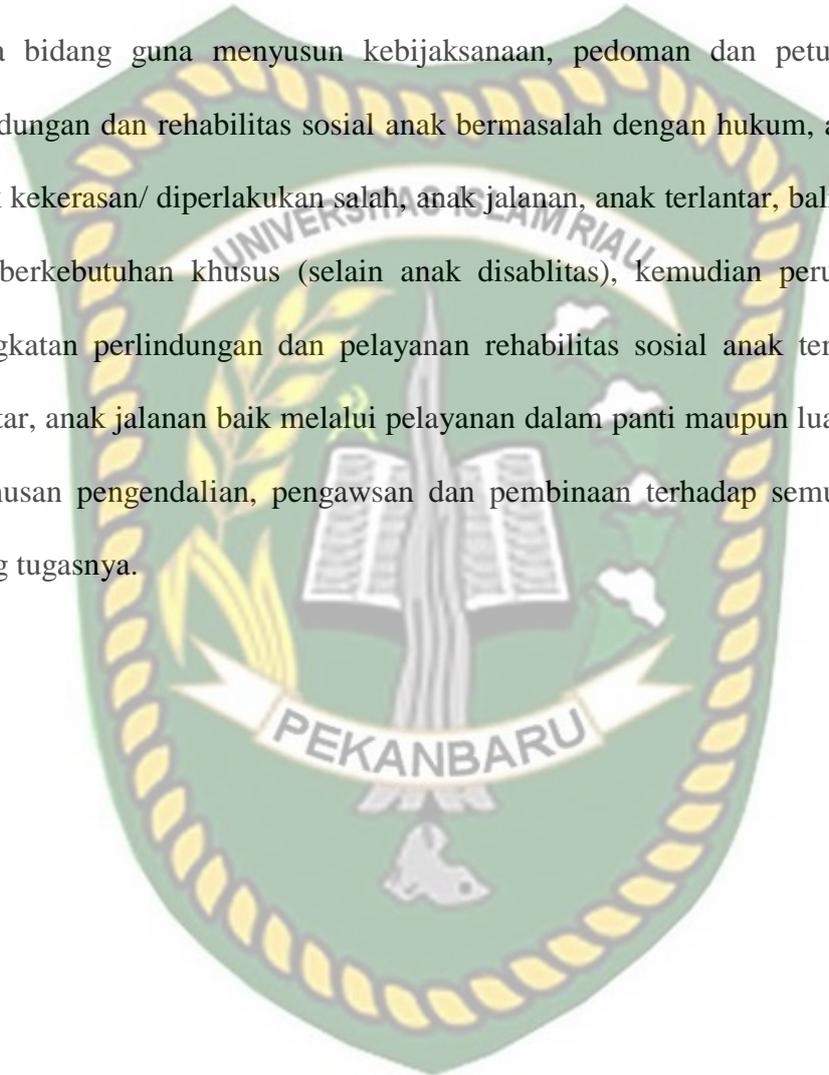
- a. Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja dan merinci jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pendataan terhadap anak.
- d. Perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah sesuai/ belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
- e. Perumusan dan penyiapan bahan – bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak

korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).

- f. Perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.
- g. Perumusan dan perluasan jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial bayi/ anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
- h. Perumusan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
- i. Perumusan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak.
- j. Perumusan dan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak (adopsi).
- k. Perumusan dan peningkatan usaha – usaha kearah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang ada di bidang tugasnya.
- l. Perumusan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.
- m. Perumusan dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang di ambil dalam pemecahan masalah.
- n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Rehabilitas dan Perlindungan Anak**

Tugas dari Kepala Seksi Rehabilitas dan Perlindungan Anak yaitu melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan – bahan yang diperlukan oleh kepala bidang guna menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitas sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas), kemudian perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitas sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti, dan perumusan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya di bidang tugasnya.





### C. Gambaran umum Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkendudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sedangkan di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

#### 1. Visi Dan Misi

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang tentram, tertib, dan taat hukum.

#### 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenang.

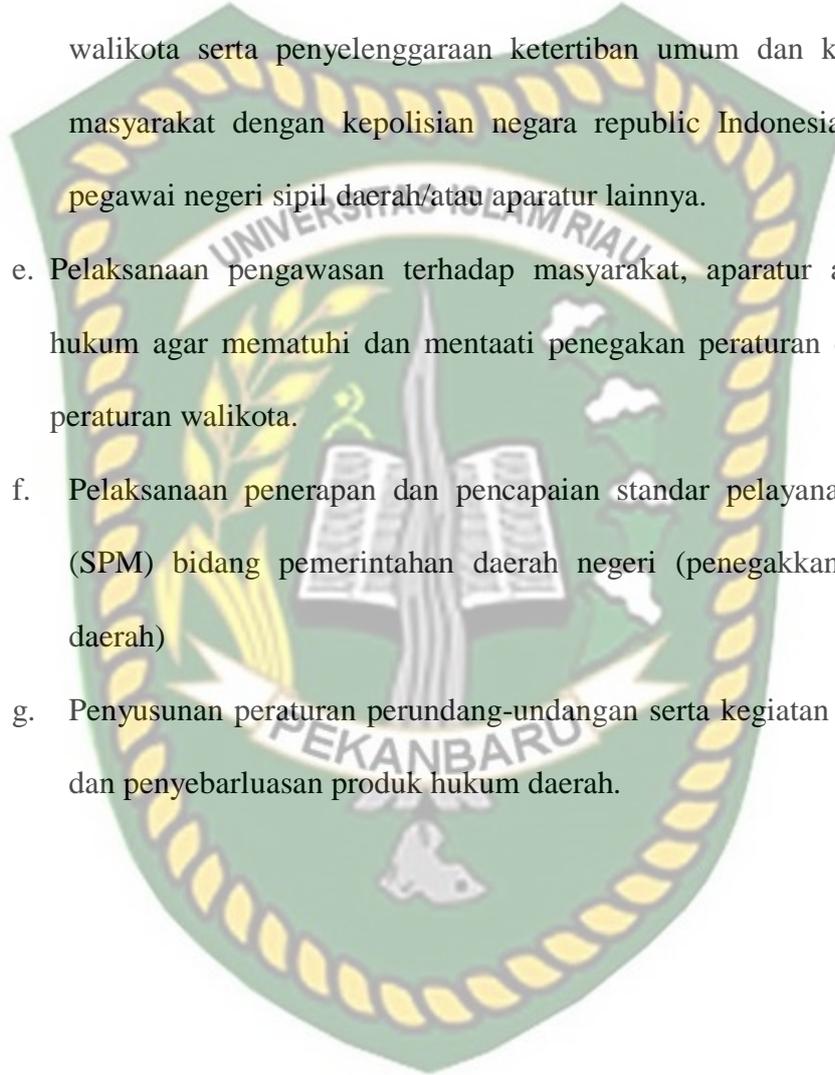
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

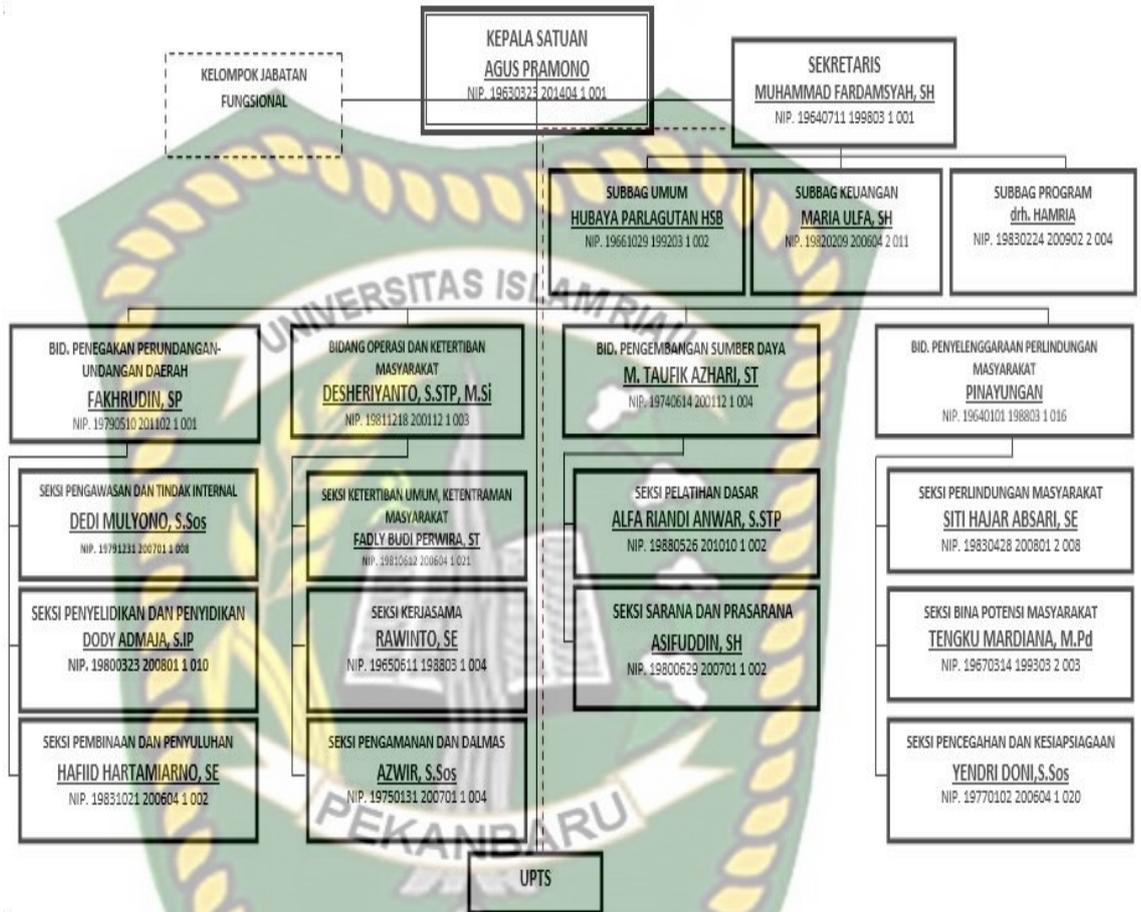
Selain dari pada itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 96 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yaitu membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pambantuan lainnya.
- b. Polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat
  - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Penyusunan dan pelaksanaan program penegakan peraturan dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republic Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan daerah negeri (penegakkan peraturan daerah)
- g. Penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.



Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



Sumber : satpol pp kota pekanbaru 2021

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan dan Key Informan

Dalam suatu penelitian terkadang muncul pertanyaan dari pembacanya, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan. Informan dalam penelitian ini yaitu pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari Kepala Seksi Bidang Rehabilitas dan Perlindungan, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Anak Jalanan.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informan, usia informan dan pendidikan informan.

Untuk mengetahui identitas informan dapat dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu:

**Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian Penulis tentang Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Fajrina, S.IP	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	Key Informan
2	Rezatul Helmi, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Informan
3	Ade	Anak Jalanan	Informan
4	Diki	Anak Jalanan	Informan
5	Raka	Anak Jalanan	Informan

(sumber: hasil penelitian lapangan 2021)

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari satu key informan yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, dan 4 orang informan yaitu Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang Anak Jalanan.

### 1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel V.2 : Identitas Informan dan Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
	Jumlah	5	100 %

(sumber: hasil penelitian lapangan 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jenis kelamin informan pada penelitian ini terdapat 2 jenis kelamin yaitu 4 laki-laki dengan persentase 80 % dan 1 perempuan dengan persentase 20 %. Jadi kesimpulan dari tabel diatas diketahui penilaian informan sudah setara atau seimbang dan tidak didominasi oleh satu jenis kelamin saja.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan juga dapat dipengaruhi oleh umur, berhubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3 : Identitas Informan dan Key Informan Berdasarkan Kriteria Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	12-14	3	60 %
2	35-45	1	20 %
3	45-50	1	20 %
	Jumlah	5	100 %

(sumber: hasil penelitian lapangan 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat usia key informan dan informandari Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang Anak Jalanan. Terdapat 3 orang dengan kriteria umur 12-14 tahun dengan persentase 60 %, 1 orang dengan kriteria umur 35-45 tahun dengan persentase 20%, 1 orang dengan kriteria umur 45-50 tahun dengan persentase 20.

### **1. Tingkat Pendidikan Informan dan Key Informan**

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil wawancara yang diajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan informan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian pelaksanaan program pelayanan medik jiwa di instalasi rehabilitasi jiwa rumah sakit jiwa tampan provinsi riau yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.4 : Identitas KeyInformen dan Informen Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	3	60 %
2	Strata Satu (Satu)	1	20 %
3	Magister (S2)	1	20 %
	Jumlah	5	100 %

*(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan key informan dan informan yang terdiri dari 3 orang tingkat pendidikan sekolah dasar (SMP) dengan persentase 60 %, 1 orang tingkat pendidikan strata 1 (S1) dengan persentase 20 %, dan 1 orang dengan tingkat pendidikan magister (S2) dengan persentase 20 %.

#### **B. Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

Hasil dari Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal dan berharap permasalahan ini dapat teratasi. Sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi program pembinaan anak jalanan di Kota Pekanbaru dibutuhkan peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai SOP yang sudah ditetapkan agardapat terwujud. Dalam hal ini tentu saja banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas Dinas Sosial dalam mengevaluasi pembinaan terhadap anak jalanan merupakan tugas yang harus dijalankan dengan baik agar kota pekanbaru terbebas dari anak jalanan yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibantu oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial kota Pekanbaru harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kecukupan, pemetaan, responsive, dan ketepatan.

**a. Efektivitas**

Menurut Sejathi (2011), efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayani (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Efektivitas sebagai salah satu kriteria Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Efektivitas berarti ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial

Kota Pekanbaru mengenai efektivitas tercapainya tujuan dari program pembinaan anak jalanan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Belum tercapai secara maksimal karena pasti ada kendala untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahun ini kami memberi edukasi terhadap anak jalanan yang sudah kami jarring tanpa adanya pelatihan yang kami berikan terhadap mereka karena dana ini dialihkan untuk bantuan Covid-19”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai hal yang sama terhadap Bapak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Disini peran kami hanya menjaring , mendata anak jalanan yang kemudian kami serahkan terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dapat diberi arahan agar dapat kembali kepada keluarganya”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai tujuan mereka melakukan program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial pada hari Sabtu, 1 Oktober 2021 mengatakan bahwa kami mendapat edukasi beserta arahan untuk kedepannya agar kami tidak lagi kembali hidup dijalan.

Sedangkan untuk hasil yang diharapkan setelah menjalankan program pembinaan Ibu Fajrina, S.IPselaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Bahwa kami berharap anak jalanan yang sudah terjaring ini tidak akan kembali kejalan lagi dan merasa jera untuk mengulangnya”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai hal yang sama terhadap Bapak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Semoga anak jalanan ini setelah didata, direunivikasi, dan dikasih edukasi tidak lagi mengulangi hal seperti ini”*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator efektivitas terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah pihak Dinas Sosial belum maksimal dalam menjalankan program pembinaan ini. karena ada 1 program yang sangat penting untuk menambah skill agar anak jalanan dapat bekerja setelah ini namun tidak terlaksana karna sarana dan prasara untuk mendukung program tersebut tidak mendukung dan dana pada tahun ini juga dialihkan untuk bantuan Covid-19.

## 2. Efisiensi

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai efisiensi dalam merealisasikan program pembinaan anak jalanan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Untuk merealisasikan program yang ada belum secara maksimal. Karena dapat dilihat sarana dan prasarana untuk melakukan program pelatihan kerja tidak memadai dan dana pada tahu ini sepenuhnya dialihkan untuk bantuan Covid-19”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai hal yang sama terhadap Bapak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Untuk membantu Dinas Sosial Kota Pekanbaru Merealisasikan program tersebut kami setiap hari melakukan peninjauan kejalan untuk menangkap anak-*

*anak jalanan yang masih ada kemudia yang tetangkap akan kami data lalu kami serahkan kepada pihak Dinas Sosial untuk dilakukakan pembinaan”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai dampak yang mereka terima setelah melakukan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dapat penulis menyimpulkan bahwa mereka hanya mendapatkan edukasi berupa siraman rohani dan motivasi agar bisa menjadi orang sukses tanpa harus hidup dijalan.

Sedangkan untuk ketersediaan dana dalam menjalankan program pembinaan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Dana untuk melaksanakan program ini ada namun terbatas. Terlebih dapat kita lihat dana pada tahun 2020 pada dialihkan untuk bantuan Covid-19”*

Selanjutnyapeneliti juga menanyakan hal yang sama kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Terkait masalah dana kami tidak ada menyediakan. Karena ini program dari Dinas Sosial maka dana juga sepenuhnya dari mereka”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai dana yang mereka terima setelah melakukan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dapat peneliti menyimpulkan bahwa mereka setelah melakukan pembinaan dari Dinas Sosial selama 2 minggu tidak mendapat bantuan dana. Mereka langsung dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan mengenai indikator efisien dalam Evaluasi

Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan dana untuk merealisasikan program yang ada dan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator efisien terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah pihak Dinas Sosial belum maksimal. Karena tidak semua program dapat terealisasikan karena keterbatasan dana yang ada. Terutama untuk program pelatihan kerja yang dananya dialihkan untuk bantuan Covid-19.

### 3. Kecukupan

Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah dan kecukupan dalam hal sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai kecukupan dalam mewujudkan program pembinaan anak jalanan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Kami udah melakukan sesuai tupoksi dan melakukan program tersebut secara maksimal agar kejadian ini tidak terulang lagi. Namun untuk menghentikan sangat sulit karena mereka yang balik lagi hidup di jalanan kebanyakan karena terkendala dari faktor ekonomi”*

Selanjutnya kami juga menanyakan hal yang sama kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Kalau kecukupan dari kami itu dari segi meninjau secara langsung anak jalanan itu setiap hari. Dalam sehari kami melakukan razia 2 kali yaitu pagi dan sore”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai kecukupan yang mereka terima setelah melakukan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dapat penulis menyimpulkan bahwa mereka hanya mendapatkan edukasi tanpa adanya dorongan untuk melanjutkan keidupan kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan mengenai indikator kecukupan dalam Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya pihak Dinas Sosia Kota pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator kecukupan terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas Sosial dan Satpol PP yang sangat antusias dalam melaksanakan tugasnya.

#### **4. Pemerataan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai pemerataan dalam mewujudkan program pembinaan anak jalanan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Kami melakukan survey kejalan itu ketika ada laporan dari masyarakat atau pengguna jalan terkait adanya keresahan. Kemudian ada juga dari jangkauan pihak kami ketika melihat sudah bnyak anak jalanan kemudian ada juga perintah dari pemangku kebijakan”*

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“Kami melakukan turun kejalan secara merata dimanapun kami melihat sudah ramai anak jalanan akan kami suvey langsung”*

Sedangkan untuk SOP dalam menjalankan program pembinaan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Semua program yang ada sudah sesuai SOP yang ada. SOP nya yang kami terapkan sekarang yaitu menerima disposisi surat pemberitahuan tentang anak jalanan, mendisposisikan kepada kepala seksi untuk ditindak lanjut, menginventarisai data anak jalanan dan membuat surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan, membuat kespakatan peelaksanaan program pembinaan oleh anak jalanan, memeriksa anak jalanan yang terjaring,melakukan koordiasi dengan oag tua anak jalanan, melaporkan hasil pembinnaan anak jalanan kepada Kepala Dinas Sosial Kota pekanbaru, pengembalian anak jalanan kepada orang tua”*

Kemudian peneliti juga menanyakan hal yang sama mengenai SOP dalam menjalankan tugas kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:mengatakan:

*“semua tugas yang kami jalankan pastinya sesuai SOP yang ada”*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai pemerataan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengataakan bahwa kegiatan yang kami lakukan secara adil dilakukan oleh semua pihak yang terjaring tanpa adanya perbedaan.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan mengenai indikator pemerataan dalam Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dikatakan sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari kinerja dari pihak Dinas Sosia Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator pemerataan terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas Sosial dan Satpol PP yang melakukan survey secara merata dan sesuai SOP.

#### 5. **Responsive**

Menurut Prasuraman dalam Yarimoglu (2014:83) responsive adalah kesediaan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan, ketepatan waktu dan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Sedangkan menurut Albarq (2013:702) bahwa responsive adalah kesediaan untuk melayani pelanggan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai responsive anak jalanan dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“semua anak jalanan yang terjaring oleh kami memberikan respon yang baik ketika diedukasi dan melakukan program yang telah kami tetapkan. Namun ada juga anak jalanan yang ketika kami arahkan dia melawan”*

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“ketika kami menagkapkan anak jalanan tersebut, kebanyakan dari mereka kabur atau melarikan diri. Namun ketika mereka yang udah tertangkap sama kami mereka memberikan respon yang tidak baik terhadap kami karena mereka takut didata yang kemudian datanya akan kami berikan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar dapat diproses”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai responsive yang mereka berikan terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa mereka tidak suka ditangkap ketika berada di jalanan. Kami berada di jalanan bukan untuk bertindak kriminal. Kami hanya mencari rezeki untuk bisa melanjutkan kehidupan kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan mengenai indikator responsive dalam Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari respon anak jalanan yang tidak baik terhadap kinerja dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator responsive terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pihak Dinas Sosial dan Satpol PP yang mendapatkan respon tidak baik dari anak jalanan ketika melaksanakan tugas.

## 6. Ketepatan

Pengertian ketepatan Menurut Budiwanto (2012:9) Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak kesesuatu sasaran sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai ketepatan dalam strategi yang diterapkan memberikan pendapat sebagai berikut:

*“Untuk strategi yang diterapkan dari tahun ketahun tidak pernah berubah. Masih tetap sama hanya saja pada tahun ini tidak ada pelatihan kerja untuk memberikan skill kepada anak jalanan dikarenakan dana dialihkan kepada bantuan Covid-19”*

Selanjutnya kami juga menanyakan hal yang sama kepada pak Rezatul Helmi, S.STP, M.Si selaku seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

*“strategi kami yang kami terapkan yaitu menangkap, mendata, dan melaporkan kepihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru”*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anak jalanan yang bernama Santi, Raka, Ade mengenai ketepatan program yang diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dapat penulis menyimpulkan bahwa mereka hanya mendapatkan edukasi tanpa adanya dorongan untuk melanjutkan kehidupan kedepannya. Mereka hanya diberikan edukasi tanpa adanya antan dana.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan mengenai indikator ketepatan dalam Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

dapat dikatakan lumayan efektif, hal ini dapat dilihat dari strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat berdasarkan indikator ketepatan terhadap Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari strategi yang diterapkan pihak Dinas Sosial dan Satpol PP tidak ada evaluasi atau perkembangan dari tahun ketahun. Sehingga masih banyak ditemukan anak jalanan yang kembali hidup dijalan.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru**

#### 1. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Fajrina,S.IP mengenai indikator efektivitas mengatakan *“Belum tercapai secara maksimal karena pasti ada kendala untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tahun ini kami memberi edukasi terhadap anak jalanan yang sudah kami jarring tanpa adanya pelatihan yang kami berikan terhadap mereka karena dana ini dialihkan untuk bantuan Covid-19”*

#### 2. Efisien

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti peneliti kepada Ibu Fajrina,S.IP mengenai indikator efisien mengatakan *“Untuk merealisasikan program yang ada belum secara maksimal. Karena dapat dilihat sarana dan prasarana untuk melakukan program pelatihan kerja*

*tidak memadai dan dana pada tahu ini sepenuhnya dialihkan untuk bantuan Covid-19”*

### 3. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai indikator kecukupan dapat ditemukan hambatan yaitu anak jalanan yang sudah terjaring dan dilakukan program pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih saja kembali lagi kejalanan.

### 4. Responsive

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai indikator responsive dapat ditemukan hambatan yaitu minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua anak jalanan tersebut agar anak tidak lagi kembali hidup dijalanan.

### 5. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai indikator ketepatan dapat ditemukan hambatan yaitu dari tahun ketahun tidak ada perubahan strategi yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar anak jalanan yang sudah melaksanakan program pembinaan dapat memiliki skill untuk kelanjutan hidup kedepannya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru maka peneliti dapat menyimpulkan:

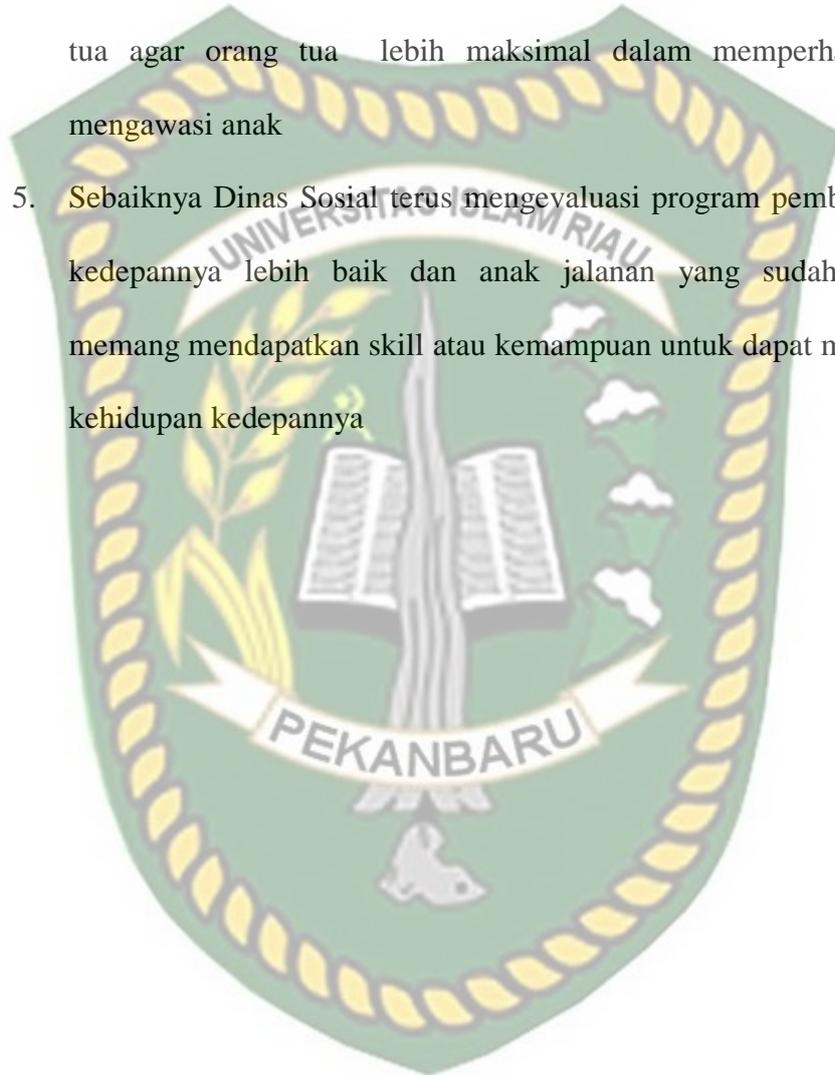
Dapat diketahui Evaluasi Program Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Karena dapat diketahui ada program yang tidak terlaksana karena adanya beberapa hambatan yang terjadi. Seperti hambatan dana untuk program pelatihan kerja yang dialihkan untuk bantuan Covid-19 dan sarana prasarana yang tidak mendukung untuk menjalankan program pembinaan.

#### B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedepannya agar pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat menyediakan anggaran dana untuk melaksanakan program pembinaan anak jalanan
2. Sebaiknya pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program pembinaan anak jalanan

3. Sebaiknya pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih ketat dalam memberi hukuman atau sanksi agar anak jalanan yang sudah terjaring merasa jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya
4. Sebaiknya pihak Dinas Sosial mampu mensosialisasikan kepada orang tua agar orang tua lebih maksimal dalam memperhatikan dan mengawasi anak
5. Sebaiknya Dinas Sosial terus mengevaluasi program pembinaan agar kedepannya lebih baik dan anak jalanan yang sudah terjaring memang mendapatkan skill atau kemampuan untuk dapat melanjutkan kehidupan kedepannya



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mater Van Horn: The Policy*.
- Akmal, Hawi. 2014. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alfatwi, NH. 2012. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Arif, Armai. 2002. *Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Perss.
- Damiri. 2013. *Arti Penting Pembinaan*. Jakarta: Kanimus.emen
- Departemen Sosial RI. 2005. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta
- Depdiknas (2008). *Kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Dikmenum. Depdiknas.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press.
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Islamy, M Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2013. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Edisi 6)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mangun, Hardjana. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanimus.
- Martono, Nanang. 2016. *Merode Penelitian Kualitatif Analisi Data dan Analisi Data Skunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi, Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Reneka Rosda Karya.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Ndraha. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Thaliziduhu. 2010. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ndraha, Thaliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Renika Cipta.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso. 2005. *Strata Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, B I L Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Kebijakan*. Bandung: Yayasan Akatiga dan Gugus Analisis.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2008. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy – Kebijakan Pemerintah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Kerjasama UNPAD-IPP.
- Suradinata, Ermaya. 1993. *Kebijakan Keputusan dan Kebijaksanaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suyatno. 2010. *Model Pembinaan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Dirjen Disaksmen Direktorat Pendidikan Nasional.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulfadli. 2004. *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis ( Bogor: Institut Pertanian)*.

### Karya Ilmiah

- Zulfadli, Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf 1 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatra Barat) Tesis (Bogor: Institut Pertanian 2004).
- Johan Narutama, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017).
- Bella Hervina, Pembinaan Karang Taruna Oleh Lurah Di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang, Jurnal, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018)

### B. Dokumen

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang – Undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial
- Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.